

**REPRESENTASI MAQASHID SYARIAH KONTEMPORER
JASSER AUDA DALAM 17+8 TUNTUTAN RAKYAT (STUDI
KASUS DEMONSTRASI DI GEDUNG DPR-RI 28 AGUSTUS
2025)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Bidang Pemikiran Politik Islam



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

IZZAH AUDINA

07040422020

PROGRAM STUDI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

2026

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Yang bertanda di bawah ini, saya:

Nama : Izzah Audina

NIM : 07040422020

Program Studi : Pemikiran Politik Islam

Judul Skripsi : Representasi Maqashid Syariah Kontemporer Jasser Auda dalam
17+8 Tuntutan Rakyat (Studi Kasus Demonstrasi di Gedung DPR-
RI 28 Agustus 2025)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atau karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 8 Januari 2026

Yang menyatakan



METERAI
TEMPEL
AGITAANK228664571

Izzah Audina
NIM.07040422020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Izzah Audina

NIM : 07040422020

Program studi : Pemikiran Politik Islam

Yang berjudul "**Representasi Maqashid Syariah Kontemporer Jasser Auda dalam 17+8 Tuntutan Rakyat (Studi Kasus Demonstrasi di Gedung DPR-RI 28 Agustus 2025)**" saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos) dalam Bidang Pemikiran Politik Islam

Surabaya, 9 Januari 2026

Pembimbing



Dr. Ainur Rofiq Al Amin, S.H., M.Ag.
NIP.197206252005011007

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Izzah Audina dengan judul : **"Representasi Maqashid Syariah Kontemporer Jasser Auda dalam 17+8 Tuntutan Rakyat (Studi Kasus Demonstrasi di Gedung DPR-RI 28 Agustus 2025)** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 8 Januari 2026.

Tim Penguji Skripsi:

1. Dr. H. Ainur Rofiq Al-Amin, S.H., M.Ag.
2. Dr. Slamet Muliono Redjosari, M.Si.
3. Laili Bariroh, M.Si.
4. Nur Hidayat Wakhid Udin, S.H.I., M.A.



Palangka Raya, 8 Januari 2026

Prof. Abdul Kadir Rivadi, Ph.D.
NIP.197008132005011003

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Izzah Audina
NIM : 07040422020
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
E-mail address : audinazh28@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul : Representasi *Maqashid Syariah* Kontemporer Jasser Auda dalam 17+8 Tuntutan Rakyat (Studi Kasus Demonstrasi di Gedung DPR-RI 28 Agustus 2025)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, dan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Januari 2025

Penulis,

(Izzah Audina)

ABSTRAK

Judul : Representasi Maqashid Syariah Kontemporer Jasser Auda dalam 17+8 Tuntutan Rakyat (Studi Kasus Demonstrasi di Gedung DPR-RI 28 Agustus 2025)

Nama mahasiswa : Izzah Audina

NIM : 07040422020

Pembimbing : Dr. Ainur Rofiq Al Amin, S.H., M.Ag.

Skripsi ini meneliti tentang bagaimana representasi *maqashid syariah* digali dalam sebuah gerakan yang bernama “17+8 Tuntutan Rakyat”. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dikarenakan penelitian ini menggunakan studi dokumen atau literatur. Kerangka pemikiran yang digunakan adalah *maqashid syariah* kontemporer yang diusulkan oleh Jasser Auda yang memiliki enam fitur sistem sebagai pisau analisis utama. Diantaranya adalah watak kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hirarki yang saling mempengaruhi, multidimensionalitas, dan kebermaksudan. Peneliti menganalisis tuntutan-tuntutan yang telah dikelompokkan ke dalam empat aspek besar yakni hukum dan HAM, politik dan tata kelola pemerintahan, ekonomi dan kesejahteraan sosial, dan demokrasi. Selanjutnya setiap fitur sistem menganalisis keempat aspek dengan dilakukan penabelan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah, “17+8 Tuntutan Rakyat” merepresentasikan *maqashid syariah* sesuai konsep Jasser Auda dikarenakan telah memenuhi keenam fitur teori sistem. Fitur watak kognitif telah terpenuhi dikarenakan 25 tuntutan sudah mampu mencakup kepentingan secara institusional tidak hanya pada individu. Pada fitur keterbukaan, 25 tuntutan sudah mencerminkan keterbukaan system untuk menghindari stagnansi sistem. Pada fitur hirarki yang saling memengaruhi, 25 tuntutan sudah menerapkan kesetaraan, tidak terbatas dan terpisah pada tingkatan. Pada fitur multidimensionalitas, 25 tuntutan sudah mampu mencakup dimensi lain selain yang secara eksplisit tertera pada tuntutan. Pada fitur kebermaksudan, 25 tuntutan sudah memiliki tujuan yang jelas yang berorientasi pada kemaslahatan (*maqashid syariah*) masih berhubungan dengan syariat islam (Al-Qur'an). Pada fitur kemenyeluruhan, 25 tuntutan sudah memenuhi dikarenakan Konsep Jasser Auda yang menerapkan teori sistem ini mengharuskan semua aspek berjalan bersama memenuhi keenam fitur untuk bisa disebut sebagai *maqashid syariah*.

Kata Kunci : Representasi, *Maqashid Syariah* Kontemporer Jasser Auda, 17+8 Tuntutan Rakyat.

DAFTAR ISI

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI	1
PERSETUJUAN PEMBIMBING	2
PENGESAHAN SKRIPSI	3
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	4
ABSTRAK	5
PERSEMBAHAN.....	6
RIWAYAT HIDUP.....	7
KATA PENGANTAR.....	8
DAFTAR ISI.....	10
DAFTAR TABEL	12
DAFTAR GAMBAR	13
BAB I.....	14
PENDAHULUAN.....	14
A. Latar Belakang	14
B. Batasan Penelitian.....	12
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13

F. Definisi Konseptual	14
G. Outline Penelitian.....	20
H. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II KAJIAN TEORI.....	22
A. Kerangka Teoritis.....	22
B. Penelitian Terdahulu.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Metode Penelitian.....	40
B. Unit Analisis.....	41
C. Data dan Sumber Data.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL ANALISIS DATA	50
A. Penyajian Data.....	50
B. Hasil Analisis.....	99
BAB V PENUTUP.....	123
A. Kesimpulan.....	123
B. Rekomendasi.....	126
DAFTAR PUSTAKA.....	127

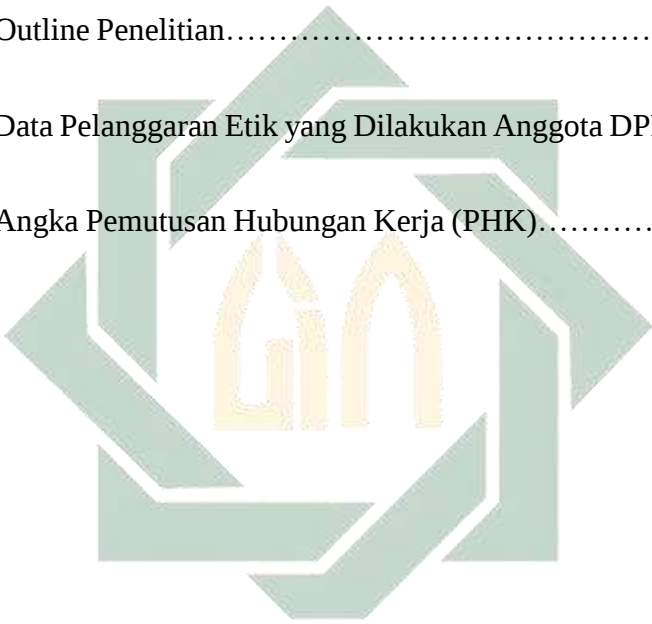
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Batasan Penelitian	12
Tabel 3.1 Metode Penelitian Menurut Syafrida.....	40
Tabel 3.2 Aspek Pengelompokan Tuntutan 17+8.....	44
Tabel 4.1 Analisis Aspek tuntutan Berdasarkan Fitur Watak Kognitif.....	105
Tabel 4.2 Analisis Aspek tuntutan Berdasarkan Fitur Kemenyeluruhan.....	109
Tabel 4.3 Analisis Aspek tuntutan Berdasarkan Fitur Keterbukaan.....	113
Tabel 4.4 Analisis Aspek tuntutan Berdasarkan Fitur Hirarki yang Saling Mempengaruhi.....	116
Tabel 4.4 Analisis Aspek tuntutan Berdasarkan Fitur Multidimensionalitas.....	119
Tabel 4.4 Analisis Aspek tuntutan Berdasarkan Fitur Kebermaksudan.....	122

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Perbandingan Gaji Guru di Asia Tenggara.....	3
Gambar 1. 2 Perbandingan Gaji Dosen di Asia Tenggara.....	4
Gambar 1. 3 Perbandingan Gaji DPR VS Gaji Warga di Beberapa Negara.....	4
Gambar 1. 4 Isi 17+8 Tuntutan Rakyat.....	8
Gambar 1. 5 Outline Penelitian.....	20
Gambar 4. 1 Data Pelanggaran Etik yang Dilakukan Anggota DPR 2019-2024....	85
Gambar 4. 2 Angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).....	94



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- (ILO), International Labour Organization. *Wage Inequality in the Context of the COVID-19 Crisis and Rising Price Inflation*, 2023. https://webapps.ilo.org/infostories/getmedia/37483fd9-fe77-42fe-8e0d-9d4e123328ff/gwr22-23_EN_chapter4.pdf.
- Abduh, Muhammad, Khafid Abadi, Athoillah Islamy, and Adib Susilo. "Analyses the Construction of the Indonesian Ulema Council Fatwâ on the Halalness of the Sinovac Covid-19 Vaccine Using Jasser Auda 's Perspective of Islamic Law Development Models." *Al-'Adalah* 18, no. 2 (2021): 269–288.
- Agama, Kementrian. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia., 2019.
- Albert, Johannes. "Reformasi Pajak Jadi Sorotan Di Gelombang Demo Mahasiswa & Buruh." *Pajaknow.Id*. Accessed December 27, 2025. https://pajaknow.id/reformasi-pajak-jadi-sorotan-di-gelombang-demo-mahasiswa-buruh/?utm_source=chatgpt.com %22Reformasi Pajak Jadi Sorotan di Gelombang Demo%22.
- Angelin, Alya, Abdul Iqbal, and Muhammad Al-Ghifari Hasibuan. "Pancasila Sebagai Sistem Etika Politik Dan Ideologi Negara." *Januari* 3 (2025): 960–964.
- Anindya Milagsita. "Apa Itu 17+8 Tuntutan Rakyat Yang Viral Di Medsos? Ini Isi Dan Penjelasan." *Detik.Com*. Last modified 2025. Accessed January 9, 2026. https://www.detik.com/jateng/berita/d-8091868/apa-itu-17-8-tuntutan-rakyat-yang-viral-di-medsos-ini-isi-dan-penjelasan?utm_source=chatgpt.com.
- Auda, Jasser. *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- . *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Ayuanda, Winda, Dindasari Sidabalok, and Alemina Br. Perangin-angin. "Budaya Jawa Dalam Film Primbon: Analisis Representasi Stuart Hall." *ALFABETA: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya* 7, no. 2 (2024): 440–449.
- Azhar, Fauziah Herlina. "Rincian Satuan Gaji Dan Tunjangan Anggota DPR, Berapa Biaya Telepon Mereka?" *Tempo*. Last modified 2025. Accessed September 16, 2025. <https://www.tempo.co/politik/rincian-satuan-gaji-dan-tunjangan-anggota-dpr-berapa-biaya-telepon-mereka--2061776>.
- Centre, Indonesian Parliamentary. "Tunjangan Tinggi Kinerja Tabola-Bale." 4 September 2025. Accessed December 27, 2025. https://www.instagram.com/p/DOLe_bcgAD3/?img_index=1.
- DetikJabar, Tim. "17+8 Tuntutan Rakyat: Isi Lengkap Dan Respons Pemerintah."

2 September.

- Fahmi, Ismail. "Sentimen Publik Terhadap Gerakan Brave Pink Hero Green." 8 September. Last modified 2025. <https://pers.droneempurit.id/sentimen-publik-terhadap-gerakan-brave-pink-hero-green/>.
- Fajri, Pujangga Candrawijyaning. "Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Pisau Analisis Dalam Penelitian Hukum Islam." *Jurnal Penelitian Agama* 23, no. 2 (2022): 247–262.
- Fikri, Hidayatullah Wasial. "Construction of Ahmad Al-Raisuni's Thought in the Perspective of Maqashid Al-Syari'ah and the Implications for Political Fiqh in Indonesia." *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2024): 418–432.
- Hall, Stuart. *Representation. Cultural Representations and Signifying Practices. Klassiker Der Sozialwissenschaften. 100 Schlüsselwerke Im Portrait*. London: SAGE Publications, 1997.
- Harisudin, M. Noor, and Muhammad Choriri. "On the Legal Sanction against Marriage Registration Violation in Southeast Asia Countries: A Jasser Auda's Maqasid Al-Shariah Perspective." *Samarah* 5, no. 1 (2021): 471–495.
- Herdiansyah. "Al-Muwafaqat Karya Masterpiece Imam Asy-Syatibi (W : 790 H / 1388 M) (Kajian Historis, Dan Kandungan Isi Kitab)." *Jurnal Hukum Das Sollen* 3, no. 1 (2019): 1–11.
- Hidayat, Khomarul. "Tarif PPN Akan Naik, Lebih Berdampak Negatif Ke Masyarakat Bawah Dibanding Kelas Atas." *Kontan.Co.Id*. Last modified 2025. Accessed January 4, 2026. <https://nasional.kontan.co.id/news/tarif-ppn-akan-naik-lebih-berdampak-negatif-ke-masyarakat-bawah-dibanding-kelas-atas>.
- HRC, Muhammad Rafi. "Tunjangan Gaji DPR Tinggi, Ekonom: Nihil Sense of Crisis Terhadap Kondisi Rakyat Yang Lagi Susah." 26 Agustus 2025. <https://riau.harianhaluan.com/nasional/1115798059/tunjangan-gaji-dpr-tinggi-ekonom-nihil-sense-of-crisis-terhadap-kondisi-rakyat-yang-lagi-susah>.
- IDN Times. "Pernyataan Lengkap Ahmad Sahroni Yang Sebut Rakyat Tolol." 30 Agustus 2025. Accessed September 16, 2025. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/pernyataan-lengkap-ahmad-sahroni-yang-sebut-rakyat-tolol-00-xvwcc-qnt2fm>.
- Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik. *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 55 / HM . 00 / VIII / 2025 Perkembangan Pemantauan Komnas HAM Atas Aksi Unjuk Rasa Pada 28-30 Agustus 2025 Di Jakarta*. Jakarta, 2025. [https://www.komnasham.go.id/users/userhumas-8c6cb63507/files/Siaran Pers Perkembangan Pemantauan Komnas HAM atas Aksi Massa.pdf](https://www.komnasham.go.id/users/userhumas-8c6cb63507/files/Siaran%20Pers%20Perkembangan%20Pemantauan%20Komnas%20HAM%20atas%20Aksi%20Massa.pdf).
- Intan Maharani. "Siapa Saja Influencer Yang Sampaikan '17+8 Tuntutan Rakyat' Ke DPR? Ini Profil Singkatnya." *Kompas.Com*. Last modified 2025. Accessed

- January 9, 2026.
<https://www.kompas.com/tren/read/2025/09/05/201500265/siapa-saja-influencer-yang-sampaikan-17-8-tuntutan-rakyat-ke-dpr-ini-profil?page=all>.
- Jakarta, DPN APINDO dan ILO. *Panduan Praktis Mengelola Hubungan Di Tempat Kerja*, 2019.
- Jauhari, Sofwan. “Penerapan Prinsip Maqashid Syariah Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Karimiyah* 4, no. 1 (2024): 1–14.
- Kepolisian, Kepala, and Negara Republik. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa*, 2006. [https://kalsel.polri.go.id/perkap/2006/PERKAP NO 16 TH 2006 TTG PENGENDALIAN MASSA.pdf](https://kalsel.polri.go.id/perkap/2006/PERKAP%20NO%2016%20TH%202006%20TTG%20PENGENDALIAN%20MASSA.pdf).
- Korupsi, Komisi Pemberantasan. “Dorong Transparansi, KPK Rekomendasikan Magelang Perkuat Pengawasan Pengadaan.” *13 November 2025*. <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/dorong-transparansi-kpk-rekomendasikan-magelang-perkuat-pengawasan-pengadaan>.
- Korupsi, Pusat Edukasi Anti. “Beberapa Kasus Korupsi Di DPR Dan Dampaknya.” *8 Oktober 2023*. Accessed December 27, 2025. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231008-beberapa-kasus-korupsi-di-dpr-dan-dampaknya>.
- Leksono, Sonny. “Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metodologi Ke Metode.” *Penelitian kualitatif ilmu ekonomi dari metodologi ke metode* (2013): 181–213.
- Lexico, s Researcher. “Resets and Realignment: Trade Ambitions, Digital Fragilities, and Social Commitments.” *Lexico Institute*. Last modified 2025. Accessed December 27, 2025. [https://lexico.id/2025/08/resets-and-realignments-trade-ambitions-digital-fragilities-and-social-commitments/?utm_source=chatgpt.com %22Resets and Realignment: Trade Ambitions, Digital Fragilities, and Social Commitments – Government Affairs Consultant; Jakarta based.%22](https://lexico.id/2025/08/resets-and-realignments-trade-ambitions-digital-fragilities-and-social-commitments/?utm_source=chatgpt.com%22Resets and Realignment: Trade Ambitions, Digital Fragilities, and Social Commitments – Government Affairs Consultant; Jakarta based.%22).
- Madrim, Sasmito. “Survei Indikator: Parpol Dan Polri Dapat Kepercayaan Terendah Dari Publik.” *5 Januari 2023*. <https://www.voaindonesia.com/a/survei-indikator-parpol-dan-polri-dapat-kepercayaan-terendah-dari-publik-/6904043.html>.
- Mahfuzah, Nandani Zahara, and Dhiauddin Tanjung. “Maqashid As-Syari’ah Menurut Jasser Auda.” *JIS: Journal Islamic Studies* 2, no. 2 (2024): 251–257.
- Majelis, Ketetapan, Permusyawaratan Rakyat, and Republik Indonesia. “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia,” no. 39 (1999).
- Memantau, Bijak. “17+8 Tuntutan Rakyat.” Accessed September 29, 2025. <https://bijakmemantau.id/tuntutan-178>.

- Multatuli, Project. "Pembunuhan Affan Kurniawan: Sebuah Kegilaan Di Jalan Penjernihan." *1 September 2025*. Accessed September 16, 2025. <https://projectmultatuli.org/pembunuhan-affan-kurniawan-sebuah-kegilaan-di-jalan-penjernihan/>.
- Mulya, Fath Putra. "Komnas HAM Calls for Restorative Justice for Detained Protesters." *2 September*. Last modified 2025. <https://en.antaranews.com/news/377513/komnas-ham-calls-for-restorative-justice-for-detained-protesters?>
- Murtadlo, Muhammad Ali. "Analisis Maqasid Syariah Jasser Auda Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam." *Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 2 (2021): 167–186.
- Nababan, Willy Medi Christian. "Belasan Ribu Pejabat Tak Laporkan Kekayaan, Seberapa Penting LHKPN Dalam Pencegahan Korupsi?" *15 April 2025*. <https://www.kompas.id/artikel/belasan-ribu-pejabat-tak-laporkan-kekayaan-seberapa-penting-lhkpn-dalam-pencegahan-korupsi>.
- Nastitie, Denty Piawai. "Komnas HAM Kecam Tindakan Brutal Aparat Yang Sampai Hilangkan Nyawa." *29 Agustus 2025*. <https://www.kompas.id/artikel/komnas-ham-kecam-tindakan-brutal-aparat-yang-sampai-hilangkan-nyawa>.
- Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif." *Wacana* 8, no. 2 (2014): 177–1828. <http://fisip.untirta.ac.id/teguh/?p=16/>.
- Paryadi. "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-border* 4, no. 2 (2021): 201–216.
- Presiden RI. *Undang-Undang Rrepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*, 2011. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39131/uu-no-2-tahun-2011>.
- Production, Warta Kota. *Influencer Merasa Dapat Intimidasi Setelah Kritik Ahmad Sahroni*, 2025. <https://www.youtube.com/watch?v=gq66LabdMRg&t=14s>.
- Pusat, Pemerintah. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, 2008.
- Putra, Rommy. "Penguatan Eksistensi Kelembagaan Komnas HAM Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *MMH* 41, no. 2 (2022): 209–217.
- Putri, Nabila. "Evaluasi Kinerja Maqasid Syariah Terhadap Oprasional Bank Syariah Di Era Digitalisasi." *Sipakainge* (2025): 186–207.
- Rahayu, Lisye Sri. "Isi 17+8 Tuntutan Rakyat, Bergema Di Medsos Dan Dibawa Ke Aksi Di DPR." *3 September*. Last modified 2025. <https://news.detik.com/berita/d-8093935/isi-17-8-tuntutan-rakyat-bergema-di-medsos-dan-dibawa-ke-aksi-di-dpr?>
- Rahmawati, Noer Bunka, Muhammad Baharudin, and Zubakhrum Tjenreng.

- “Peran Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik : Perspektif Teoretis” 5, no. 1 (2025): 313–323.
- Rajagukguk, K Johnson, and Ahmad Redi. “Economic Analysis In The Formation Of Legislation In Indonesia” 3, no. 2 (2025).
- Rakyat, Majelis Permusyawaratan, and Republik Indonesia. “Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia” (2000): 171–186. <https://uu.vlsm.org/MPR/2000/TAP-MPR-2000-007-PERAN-TENTARA-NASIONAL-INDONESIA-DAN-PERAN-KEPOLISIAN-NEGARA-REPUBLIK-INDONESIA.pdf>.
- Ranawati, Nur Khansa. “Apa Itu 17+8 Tuntutan Rakyat Yang Ramai Di Medsos Dan Maknanya.” 2 September. Last modified 2025. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-8092490/apa-itu-17-8-tuntutan-rakyat-yang-ramai-di-medsos-dan-maknanya?>
- RI, DPR. *Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia*, 2011. https://berkas.dpr.go.id/jdih/document/peraturan_dpr/perdpr4_2011_02.pdf.
- RI, MPR. “Daftar Riwayat Hidup Ahmad Sahroni.” Accessed September 16, 2025. <https://mpr.go.id/detailAnggotaPDF/3122/Dr.-H.-AHMAD-SAHRONI,-SE.,-M.I.Kom>.
- RI, Presiden. *UU Nomor 34 Tahun 2004*, 2004. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40774/uu-no-34-tahun-2004>.
- Rosyadi, M Syam. “Ikhtisar Al-Raisuni Atas Maqashid Al-Syari’ah (Studi Pemikiran Maqashid Al-Raisuni)” 02, no. 02 (2025): 95–106.
- Safitri, Eva. “Daftar Pasal Kontroversial Di RUU TNI Yang Baru Disahkan DPR Jadi UU.” *Detik News*. Last modified 2025. Accessed December 27, 2025. <https://news.detik.com/berita/d-7832458/daftar-pasal-kontroversial-di-ruu-tni-yang-baru-disahkan-dpr-jadi-uu>.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2022.
- Sinaga, Dameria. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)*, 2023.
- Siregar, Muhammad Akbar, and Novita Sari Sitompul Joice Natalia Lubis, Patrecia Gabriella Siregar. “Dinamika Check Dan Balance Antar Lembaga Negara Di Indonesia Pada Masa Periode Kedua Presiden Jokowi” 2, no. 4 (2025): 365–372.
- Syapar Alim Siregar. “Implementasi Al-Maqashid Syariah Dalam Tatanan Hukum Di Indonesia.” *I’tiqadiyah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan* 1, no. 2 (2024): 184–198.
- Tabrozi, Dhika. “Ijtihad Maqashid Sharia In The Thought of Asy-Syatibi and Muhammad At-Tahir Ibn Ashur.” *al-Mazaahib (jurnal perbandingan hukum)*

13, no. 1 (2025).

Tempo. "Kemenkeu: Video Sri Mulyani Bilang Guru Beban Negara Merupakan Hoaks." *19 Agustus 2025*. Accessed September 16, 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/kemenkeu-video-sri-mulyani-bilang-guru-beban-negara-merupakan-hoaks-2060796>.

Utsany, Royan, Tw Afrizal, and Khamim. "Women's Rights and Gender Equality: An Analysis of Jasser Auda's Thoughts and His Contribution to Renewal of Islamic Family Law in Indonesia." *Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2022): 54–73.

Yasin, Hendra. "Pemikiran Jasser Auda Tentang Rekonstruksi Visi Politik Hukum Islam Dalam Dialektika Maqasid Syariah Serta Formulasi Kebijakan Publik." *Al-Himayah* 8, no. 2 (2024): 129–147.

Yusuf, Nasruddin, Nurlaila Harun, Syarifuddin, and Salma Mursyid. "Examining the Basis of Maqashid Sharia in Renewal of Islamic Law in Indonesia." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 9, no. 1 (2024): 357–375.

"Alasan Mahfud MD Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset." *Transparency International Indonesia*. Last modified 2023. Accessed December 27, 2025. https://ti.or.id/alasan-mahfud-md-dorong-pembahasan-ruu-perampasan-aset/?utm_source=chatgpt.com %22Alasan Mahfud MD Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset – Transparency International Indonesia%22.

"Dosis Berat Pelemahan KPK Oleh DPR Dikurangi Sedikit Oleh Presiden, Tidak Ada Penguatan." *Indonesian Corruption Watch*. Last modified 2019. Accessed December 27, 2025. <https://antikorupsi.org/id/article/dosis-berat-pelemahan-kpk-oleh-dpr-dikurangi-sedikit-oleh-presiden-tidak-ada-penguatan>.

"Influencer Serahkan Dokumen '17+8 Tuntutan Rakyat' Secara Resmi Ke DPR." *Voi.Id*. Last modified 2025. Accessed January 9, 2026. https://voi.id/berita/511866/influencer-serahkan-dokumen-17-8-tuntutan-rakyat-secara-resmi-ke-dpr?utm_source=chatgpt.com.

"Ingatan Adalah Senjata, Merawatnya Adalah Ancaman Bagi Penguasa." *Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)*. Last modified 2025. Accessed December 27, 2025. https://www.instagram.com/p/DODRCTzjWNv/?img_index=1.

"KPK: Pengesahan RUU Perampasan Aset, Percepat Pemulihan Kerugian Keuangan Negara." *KPK*. Last modified 2025. Accessed December 27, 2025. https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/KPK-pengesahan-ruu-perampasan-aset-percepat-pemulihan-kerugian-keuangan-negara?utm_source=chatgpt.com %22KPK%3A Pengesahan RUU Perampasan Aset, Percepat Pemulihan Kerugian Keuangan Negara%22.

"No Title." Accessed September 16, 2025. <https://www.instagram.com/reel/DN5mR0vjEin/?igsh=OHZ5bnZscXdwM25>

y.

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” 1945.
<https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45ASLI.pdf>.



UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A